

BAB I PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sebagai satu kesatuan dharma perguruan tinggi yang lain, seperti dharma pendidikan dan pengajaran, serta dharma penelitian. Ketiga Dharma Perguruan Tinggi ini yang diberlakukan di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan PkM diharapkan selalu ada keterikatan atau bahkan kemandirian antara perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan demikian ada pencegahan isolasi perguruan tinggi dari masyarakat.

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (PPs-Unwar) mempunyai visi “Terwujudnya PPs-Unwar sebagai pusat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) lingkungan kepariwisataan, sehingga menghasilkan magister dan doktor yang memiliki daya saing global tahun 2034”.

Adapun misi PPs-Unwar adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, didukung oleh teknologi informasi (TI) dengan implementasi sistem penjaminan mutu.
2. Mengembangkan Penelitian dan PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta baik regional, nasional, dan global.
4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sesuai tuntutan global,

A. Keberadaan Perguruan Tinggi

Pada dasarnya keberadaan perguruan tinggi di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu dan teknologi dalam menghadapi berbagai tantangan masalah kehidupan yang semakin kompleks. Ilmu dan teknologi berfungsi membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Keberadaan Perguruan Tinggi juga merupakan investasi masyarakat yang diharapkan mempunyai nilai tambah dari hasil investasi itu bagi pengembangan mutu sumber daya manusia. Perkembangan dan pendayagunaan ilmu dan teknologi harus didasari nilai-nilai moral yang luhur yang menuju ke arah keselamatan, kesejahteraan, dan kebudayaan umat manusia.

B. Hakekat Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan bagian integral dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang sedang berjuang dan membangun untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan proklamasi serta kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai amanat yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu dalam situasi yang bagaimanapun. Perguruan Tinggi berperan serta secara aktif paling depan dalam proses mencapai tujuan negara.

C. Peranan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi di Indonesia dikembangkan dan diarahkan untuk berperan dalam masyarakat sebagai:

1. Pusat pengembangan pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi yang berjiwa pengabdian, dan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.
2. Pusat pengembangan ilmu dan teknologi, serta pusat penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang.
3. Pengembangan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah, berbudaya, berkepribadian Indonesia, dan bermoral Pancasila.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia menurut PP No. 60 tahun 1999 pasal 3 adalah:

1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta PkM.
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik.
3. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau/menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. PkM merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

E. Dana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Untuk mendukung pelaksanaan PkM PPs-Unwar menyediakan dana pengabdian yang besarnya diatur tersendiri dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).
2. RKAT PkM menurut masing-masing program studi (mono disiplin), dan pengabdian antar bidang ilmu (multi disiplin) besarnya masing-masing judul PkM diatur oleh PPs-Unwar.
3. Dana PkM ini harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui Direktur.
4. Sumber dana PkM dapat berasal dari RKAT maupun dari instansi pemerintah atau swasta.
5. Pemerintah melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi tahun 2012, melaksanakan program PkM dengan nama program: a) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi Masyarakat (IbM), b) IPTEK bagi Kewirausahaan (IbK), c) Program IPTEK bagi Produk Ekspor (IbPE), d) Program IPTEK bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (Ib-KK), e) Program IPTEK bagi Wilayah (IbW). Usulan PkM ini sudah diterima Dirjen Dikti paling lambat 31 Mei setiap tahun, (*download* di www.kemdiknas.dikti.go.id).

BAB II

LANDASAN DAN DHARMA PkM

A. Landasan

Landasan dan dasar hukum PkM PPs-Unwar dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Kepmenkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999, tentang Kedudukan dan Tugas Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI. Nomor 54/Dikti/Kep/2011, tentang Penugasan Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Pemerdayaan Peran Masyarakat (KKN-PPM) bagi Dosen Perguruan Tinggi 2011.
7. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Nomor: 05/Yas-Korp/KP-VII/1994 tentang Pendirian PPs-Unwar.
8. Keputusan BAN-PT Depdikbud Nomor 002/Ban-PT/Ak-II/XII/1998 dan SK. Depdiknas RI Nomor 001/Ban-PT/Ak-V/II/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 tentang Akreditasi Program Studi di Lingkungan PPs-Unwar.
9. Statuta Unwar Tahun 2015.
10. Organisasi dan Tata Kerja PPs-Unwar Tahun 2015.

B. Pengertian.

PkM oleh Perguruan Tinggi adalah pengamalan IPTEK yang dilakukan secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan, dan mengembangkan manusia pembangunan.

C. Dharma PkM

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Kegiatan PkM oleh Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan dan menyukkseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan khalayak sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian PkM harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari PkM mencakup hal-hal:

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai tuntutan pembangunan.
- 2) Meningkatkan pembinaan instansi dan masyarakat profesi sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.
- 3) Memberikan dorongan untuk pengembangan kurikulum di perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Azas

PkM yang dilakukan oleh PPs-Unwar dilandasi oleh azas-azas sebagai berikut:

a. Azas Kelembagaan

Dalam arti kegiatan PkM untuk dan atas nama PPs-Unwar.

b. Azas Keilmuan-Ilmiah

Setiap PkM harus didasarkan pikiran ilmiah, ilmu pengetahuan yang dimiliki harus diamalkan dalam bentuk pengabdian di masyarakat.

c. Azas Kerjasama

Setiap kegiatan PkM dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bersifat saling menguntungkan.

d. Azas Kesyinambungan

Pelaksanaan PkM merupakan usaha sadar yang terencana atas dasar tahapan-tahapan yang berkesinambungan menuju perkembangan dan kemajuan IPTEK.

e. Azas Edukatif dan Pengembangan

Kegiatan PkM bersifat edukatif dan pengembangan nalar masyarakat sasaran.

3. Sasaran

Sasaran PkM adalah:

- a. Masyarakat luas yang memerlukan peningkatan dan pengembangan.
- b. Kader-kader pembangunan yang memerlukan peningkatan kemampuan diri.
- c. Masyarakat yang mempunyai potensi yang belum dimanfaatkan dalam pembangunan.
- d. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya yang memerlukan bantuan pembinaan dan pengembangan.
- e. Masyarakat lain yang memerlukan uluran tangan PPs-Unwar.

4. Pendekatan

Pendekatan kegiatan PkM PPs-Unwar adalah:

- a. Pendekatan multi dimensi yang edukatif berpedoman pada konsep pendidikan non formal.
- b. Pendekatan multi dimensi yang bersifat pelayanan.

BAB III

KEGIATAN PkM

Kegiatan PkM PPs-Unwar meliputi bentuk kegiatan dan sifat kegiatan.

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan bidang PkM PPs-Unwar meliputi: Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Penerapan Hasil Penelitian, Pengembangan Wilayah Secara Terpadu, Alih Teknologi, dan Kaji Tindak.

1. Pendidikan kepada Masyarakat

Kegiatan pendidikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia melalui pendidikan non formal. Bentuk-bentuk kegiatannya dapat berupa: pendidikan keluarga, panataran, kursus-kursus, lokakarya, penyuluhan, latihan, bimbingan kerja/teknis, proyek percontohan, dan kelompok belajar.

2. Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan yang dimaksud adalah pemberian layanan secara profesional kepada masyarakat yang memerlukan. Pelayanan yang diberikan berbentuk: perencanaan kota/desa, studi kelayakan, pelayanan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan pertanian dalam arti luas, pelayanan manajemen, bantuan dan konsultasi hukum, pelayanan teknologi/disain, dan komunikasi pendidikan, konsultasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki PPs-Unwar, serta kerja sama dengan badan-badan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta di tingkat regional, nasional, dan internasional.

3. Penerapan Hasil Penelitian

Dapat berupa: penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil-hasil penelitian, dan penerapan berbagai ilmu terapan.

4. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu

PPs-Unwar dalam mewujudkan kegiatan ini menetapkan desa binaan sebagai sentra aktivitas. Bekerjasama dengan Pemkab/Pemkot yang ada di Bali ditetapkan desa-desa yang menjadi desa binaan untuk jangka waktu lima tahun. Pembinaan dilakukan secara interdisipliner dengan harapan bisa menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.

5. Alih Teknologi

Merupakan kelanjutan pengembangan hasil-hasil penelitian tidak hanya sebagai proses teknologi, tetapi merupakan paduan proses ekonomi, sosial, dan budaya. Teknologi yang dipilih harus dapat langsung dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat dan mampu menciptakan kegiatan yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

6. Kaji Tindak

Yaitu salah satu bentuk PkM dengan cara melaksanakan kegiatan (*action*) yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru serta memecahkan masalah dengan penerapan langsung gagasan-gagasan terhadap masalah-masalah aktual dalam masyarakat atau di dunia usaha.

B. Sifat Kegiatan

1. Rintisan

Merupakan hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan. Kegiatan rintisan sering memerlukan uji coba di lapangan ataupun di masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, manfaatnya bagi masyarakat dapat diandalkan, dan dalam uji coba di lapangan masyarakat tidak dirugikan.

2. Penunjang

Yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pokok dengan tujuan mempercepat proses pembangunan. Kegiatan tersebut bisa bersifat komplementer atau suplementer.

BAB IV

LANGKAH - LANGKAH PkM

1. Analisis Situasi

Sebelum melakukan kegiatan PkM, harus diketahui kesesuaian situasi dan kondisi khalayak sasaran. Dalam langkah ini, ada dua hal pokok yang harus ditentukan. Pertama, menentukan masyarakat sasaran, organisasi tertentu, atau orang-orang tertentu dalam masyarakat. Kedua, menentukan bidang permasalahan yang akan digali secara komprehensif.

2. Identifikasi Masalah

Mengenali masalah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat sasaran dan merumuskan permasalahan secara jelas.

3. Menentukan Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pada tahap ini harus jelas diketahui “kondisi baru“ yang bagaimana diinginkan. Dengan kata lain, apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan serta manfaat apa yang diperoleh masyarakat dari kegiatan tersebut.

4. Rencana Pemecahan Masalah

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi dengan jelas, selanjutnya dicari pemecahannya. Perlu ditentukan alternatif pemecahan yang mungkin dipakai.

5. Menetapkan Masyarakat Sasaran Strategis

Memilih orang-orang dari masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PkM. Biasanya dipilih anggota masyarakat, komunitas, organisasi atau individu yang dapat menerima dan menerapkan IPTEK yang dijadikan materi kegiatan PkM.

6. Pendekatan Sosial

Pendekatan terhadap masyarakat sasaran yang prinsipnya menjadikan masyarakat sasaran sebagai subyek dan bukan obyek dari kegiatan PkM. Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka menghadapi masalah seperti yang dirumuskan di atas.

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan PkM harus dibuat perencanaan yang matang dan jelas. Dalam perencanaan setidaknya mencakup: bentuk kegiatan, metode yang dipakai, kapan dan dimana pelaksanaannya, serta menetapkan orang-orang yang akan terlibat didalamnya.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Tindakan pemantauan dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan. Dengan demikian kalau ada kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan akan dideteksi lebih dini untuk kemudian dilakukan penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi apakah tujuan kegiatan PkM telah tercapai.

9. Pemantapan

Agar hasil yang dicapai dalam kegiatan PkM bisa menjadi bagian dari gerakan pembangunan masyarakat, maka sangat diperlukan upaya untuk memelihara dan menetapkan hasil-hasil tersebut. Hal ini memerlukan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan.

10. Pembuatan Laporan PkM

Setelah selesai melakukan kegiatan PkM, tim/panitia pelaksana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bentuk laporan harus singkat dan meliputi:

1. Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Tempat pengabdian dan kelompok sasaran.
3. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan.
4. Dampak hasil kegiatan.
5. Format laporan terlampir.
6. Abstrak.
7. Lampiran-lampiran:
 - a. Pengalaman dalam melaksanakan pengabdian.
 - b. Surat penugasan Direktur.
 - c. Surat ijin untuk melakukan pengabdian dari pejabat setempat.
 - d. Foto-foto kegiatan.
 - e. Foto copy daftar hadir kelompok sasaran.
 - f. Makalah yang disajikan dalam pengabdian.

**FORMAT USULAN KEGIATAN
PkM**

1. Judul	:	
Di Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	

2. Ketua Pelaksana		
a. Nama dan Gelar	:	
b. Pangkat / Golongan	:	
c. Jabatan Sekarang	:	
d. Pengalaman dalam Bidang PkM	:	
e. Sedang Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat	:	Ya / Tidak
f. Tempat Kegiatan	:	

3. Jangka Waktu Pengabdian kepada Masyarakat	:	bulan
Mulai Bulan	:	s.d.

4. Biaya Yang Diperlukan		
Dari RKAT PPs-Unwar	:	
Lain-lain	:	

Mengetahui,
Direktur PPs-Unwar

Denpasar,
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP / NIK:

(.....)
NIP / NIK:

FORMAT PROPOSAL

A. JUDUL

Sebutkan: (a) Judul usulan kegiatan secara lengkap dan jelas, (b) Nama dan Tempat dimana kegiatan PkM dilaksanakan (Dusun / Banjar / Lingkungan, Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota).

B. DASAR PEMIKIRAN

Uraikan latar belakang mengapa usulan kegiatan tersebut dipilih dan penting untuk dilaksanakan. Uraian meliputi:

1. Situasi dijelaskan secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
2. Berdasarkan atas observasi.
3. Masalah yang ada (rumusan masalah).
4. Alternatif pemecahan masalah.

D. TUJUAN

Tujuan kegiatan serta hasil yang ingin dicapai harus dijabarkan sedapat mungkin dalam bentuk yang dapat diukur dan sespesifik mungkin.

E. MANFAAT

Sebutkan manfaat yang diharapkan akan terwujud melalui kegiatan tersebut.

F. BENTUK KEGIATAN

Sebutkan bentuk-bentuk kegiatan PkM.

G. SASARAN

Sebutkan kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan.

H. KEGIATAN POKOK

Uraikan mengenai isi materi yang akan dilaksanakan, termasuk proses dan metode pendekatan yang dipakai.

I. JADWAL WAKTU

Sebutkan waktu yang dipakai dan pentahapannya dalam penyelesaian kegiatan.

J. EVALUASI

Uraikan kriteria dan sistem evaluasi yang dipakai untuk menilai baik kemajuan maupun hasilnya.

K. BIAYA

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Persiapan | : |
| 2. Transportasi | : |
| 3. Alat-alat | : |
| 4. Bahan-bahan | : |
| 5. Akomodasi | : |

6. Penyusunan Laporan:
7. Lain-lain :

L. SUSUNAN PERSONALIA

1. Ketua Pelaksana

- 1.1 Nama Lengkap dan Gelar :
1.2 NIK / NIP :
1.3 Pangkat / Golongan :
1.4 Jabatan Sekarang :
1.5 Tempat Kegiatan :
1.6 Waktu yang disediakan :
untuk kegiatan ini (dalam jam per minggu)

- 2. Tenaga Pelaksana** : Sesuai dengan penugasan.

ABSTRAK

Judul:

Tempat Kegiatan:

- a. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Sasaran dan Manfaat Kegiatan
- d. Metode / Teknik Kegiatan
- e. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....
- f. Dampak atau Pengaruh Kegiatan
- g. Hasil PkM.....

Contoh Halaman Depan Laporan

**KURSUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAGI PARA KETUA SEKSI LKMD DI DESA,
KECAMATAN, KABUPATEN**

**LAPORAN KEGIATAN
PkM**



Oleh:

- 1.....(Ketua)
- 2.....(Anggota)
- 3.....(Anggota)
- 4..... dst.

Dibiayai dengan anggaran: RKAT PPs-Unwar

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
TAHUN**

Contoh Halaman Pengesahan

**LAPORAN
PkM**

Judul
.....
.....

Telah disahkan pada:

Hari :
Tanggal :

Denpasar,

**UNIVERSITAS WARMADEWA
PROGRAM PASCASARJANA
Direktur,**

(.....)
NIP / NIK:

Sistematika Laporan PKM

- 1. Halaman Depan**
- 2. Halaman Dalam**
- 3. Format Pengesahan**
- 4. Abstrak**
- 5. Kata Pengantar**
- 6. Daftar Isi**
- 7. Hasil dan Pembahasan dalam Bab**
- 8. Daftar Pustaka**
- 9. Lampiran**

Bagan Kerangka Laporan PkM

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah Masyarakat (Keadaan Umum Daerah Kegiatan)
- 1.3 Tujuan Kegiatan
- 1.4 Manfaat Kegiatan

BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB IV. HASIL KEGIATAN

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Peta Wilayah
Surat Ijin Pemda
Jadwal Kegiatan
Foto-foto Kegiatan
Foto Copy Piagam (kalau ada)
Surat Tugas Rektor
Foto Copy Daftar Hadir Kelompok Sasaran
Makalah yang Disajikan

Kriteria Rumusan

No.	Kriteria	Acuan	Bobot	Skor	Nilai
1	Masalah yang Ditangani	A. Judul B. Analisis Situasi C. Perumusan Masalah	15		
2	Tujuan dan Manfaat	D. Tujuan E. Manfaat	15		
3	Kerangka Berfikir	F. Pemecahan Masalah G. Masyarakat Sasaran Strategis H. Metode Kegiatan	30		
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas PkM	I. Rencana dan Jadwal Kerja J. Organisasi Pelaksana K. Rencana Biaya	30		

Catatan: Masing-masing Kriteria Diberi Skor: 1-2-3-4-5

Hasil Penilaian : Diterima / Ditolak

Dengan Catatan :

Saran Rekomendasi :

.....2015

Penilai,

(.....)

NIP / NIK:

Contoh Format Ringkasan

Judul

Nama Pelaksana (tanpa gelar)

Permasalahan

Tujuan dan Manfaat

Kerangka Pemikiran (Rencana Pemecahan Masalah, Masyarakat Sasaran, Metode Pengabdian)

Pelaksanaan dan Hasil

Kesimpulan dan Saran

Ringkasan diketik 1,5 spasi, maksimum 2 halaman kuarto.

1. Masalah yang Ditangani	A. Judul	A. Judul tak mencerminkan judul PkM.
	B. Analisis Situasi	B. Data tidak lengkap dan tidak relevan dengan masalah. Analisis kurang tajam.
	C. Perumusan Masalah	C. Masalah tidak spesifik dan kurang kongkrit serta tidak menggambarkan bahwa itu masalah masyarakat sasaran. Lebih bersifat masalah di Perguruan Tinggi / Staf Pengajar.
2. Tujuan dan Manfaat	D. Tujuan	D. Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan adanya perubahan kondisi masyarakat sasaran.
	E. Manfaat	E. Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan masyarakat sasaran.
3. Kerangka Pemikiran	F. Pemecahan Masalah	F. Penggambaran alternatif kurang lengkap, serta dasar pemilihan alternatif tertentu kurang dilandasi teori, kenyataan dan kondisi yang ada.
	G. Masyarakat Sasaran Strategis	G. Identifikasi masyarakat sasaran strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan/atau kurang strategis (daya sebar ke masyarakat lain kurang).
	H. Metode Kegiatan	H. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi masyarakat sasaran.
4. Evaluasi	I. Rancangan Evaluasi	I. Kriteria/variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan,

		dan/atau dampak manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kriteria variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas.
5. Fisibilitas Pengabdian kepada Masyarakat	J. Rencana dan Jadwal Kerja K. Organisasi Pelaksana L. Biaya	J. Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode masyarakat, serta kondisi/kemampuan para pelaksana. K. Komposisi personalia kurang mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar Bidang Ilmu. L. Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan (terlalu tinggi) serta komponen biaya kurang rinci.



**STUDI BANDING KE UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN
PKM KE KUTAI – KALIMANTAN**

**Program Pascasarjana PPs-Unwar
Denpasar – Bali, 1 - 4 November 2015**